

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wabah Covid 19 telah menyebar secara global di belahan dunia. Wabah ini bermula di Provinsi Wuhan China pada bulan Desember tahun 2019 lalu dan kemudian virus ini telah mewabah secara cepat. Berbagai negara telah terdampak akan bahaya ancaman wabah virus ini, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah kebijakan dari berbagai sektor sejak Indonesia dinyatakan darurat Covid 19 pada bulan Maret lalu seiring dengan bertambahnya korban yang terinfeksi. Semua kegiatan di berbagai sektor mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat beribadah, pariwisata dan sekolah terpaksa harus ditutup. *Work Form Home* atau bekerja dari rumah menjadi skenario terbaik agar aktifitas di luar rumah dapat tetap berjalan.

Demi percepatan dalam penanganan penyebaran virus corona ini, pemerintah mengalihkan semua kegiatan di rumah baik bekerja dan beribadah dari rumah termasuk proses pembelajaran seiring dengan anjuran pemerintah untuk tetap *stay at home* dan *physical distancing* serta harus mengikuti protokol kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh WHO jika terpaksa memang harus keluar rumah. Hal ini tentu membuat banyak perubahan dan pembaharuan kebijakan dalam menghadapi situasi pandemi covid-19. Perubahan berbagai kebijakan ini pun mengikutsertakan dunia pendidikan yang mana pendidikan yang awalnya dilaksanakan secara konvensional kini harus dilakukan dari rumah secara online.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Surat Edaran Nomor 15 ini diperkuat dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (covid-19). Dalam Surat Edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan

selama darurat Covid-19. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Pilihannya saat ini yang utama adalah memutus mata rantai Covid-19 dengan kondisi yang ada semaksimal mungkin, dengan tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan. Prinsipnya keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh satuan pendidikan adalah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah (Kemendikbud, 2020).

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan Belajar dari Rumah atau *learning from home* (Oebadillah, 2020). Demi mentaati dan merealisasikan peraturan dari pemerintah serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses pembelajaran konvensional yang dilaksanakan secara tatap muka beralih dengan proses belajar secara virtual dari rumah agar peserta didik tetap mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan walaupun berada di rumah. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui berbagai aplikasi secara online agar dapat meminimalisir kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa, sehingga peserta didik dan guru pun dapat terhubung secara bersamaan walaupun dari tempat yang berbeda tanpa harus bertatap muka secara langsung selama proses pembelajaran.

Salah satu bentuk pembelajaran alternatif yang dapat dilaksanakan selama masa darurat covid-19 ini adalah pembelajaran secara online (Firman, 2020) Menurut Moore, Dickson-Deane & Galyen (2011) Pembelajaran online merupakan pembelajaran yang menggunakan koneksi internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran (Gikas & Grant, 2013). Penggunaan teknologi *mobile* memiliki sumbangsih besar di dunia pendidikan, termasuk didalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh (Alkan, 2011).

Pembelajaran *daring* saat ini dianggap solusi ditengah pandemi, namun mulai menuai kontroversi. Bagi guru sendiri pembelajaran *daring* dengan belajar

di rumah dianggap lebih cocok untuk pemberian tugas yang dikerjakan secara *daring* namun tidak efektif dalam penyampaian materi ke peserta didik. Selain infrastruktur yang berbeda-beda, tidak semua peserta didik memiliki teknologi digital yang sama. Kualitas koneksi, *gadget*, dan kuota internet yang masih mahal menjadi hambatan utama baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik di Indonesia (Watrianthos, 2020).

Pendidikan di masa pandemi covid-19 ini kian menjadi sorotan. Berbagai keluhan pun datang mulai dari siswa selaku aktor dari pendidikan itu sendiri. Kepemilikan *smartphone* dari para siswa mempunyai sumbangan besar dalam pencapaian tujuan pembelajaran secara *daring*. Namun sayangnya, *smartphone* yang sudah menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari nyatanya masih menjadi kebutuhan tersier bagi sebahagian masyarakat. Dilansir dari tribunews.com, siswa yang keluarganya tidak memiliki *smartphone* terpaksa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran online dan memilih datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara langsung dan didampingi oleh para guru. Kasus ini di temukan tepatnya di Rembang, Jawa Tengah dimana siswa terpaksa belajar sendiri di sekolah dikarenakan tidak mempunyai telepon pintar untuk belajar online. Siswa bersekolah di SMPN 1 Rembang belajar layaknya hari normal namun tanpa teman (Tribunnewsmarker.com, 2020).

Di lain hal, mereka yang tidak mampu untuk membeli kuota harus datang ke rumah temannya yang memiliki kuota. Dilansir dari Suara.com, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Letno Listyarti menjelaskan adanya sejumlah aduan yang datang dari siswa dengan beragam keluhan. Salah satu siswa mengeluh dikarenakan teman-temannya yang acap kali datang kerumahnya lantaran temannya tidak memiliki cukup kuota untuk mendengarkan pembelajaran dari guru (Rizki, 2020). Hal ini justru menimbulkan keprihatinan, mengingat pembelajaran *daring* dipilih sebagai alternatif untuk mengurangi kerumunan justru malah menimbulkan keramaian.

Berbagai polemik di dunia pendidikan bermunculan seiring dengan pembelajaran secara *daring* selama pandemi ini. Tidak hanya para siswa saja yang merasa keberatan dan mengeluh dalam mengikuti pembelajaran secara online.

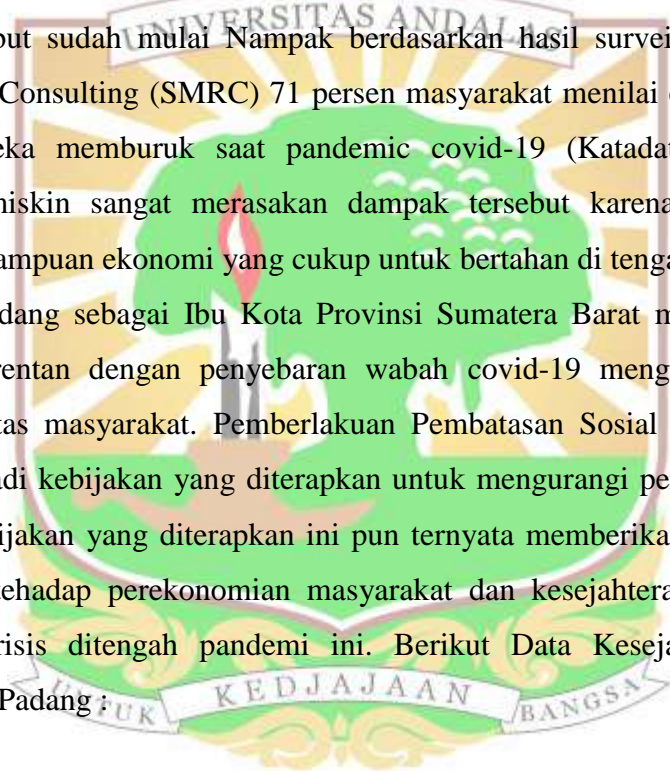
Tenaga pendidik pun ikut kewalahan harus menyesuaikan kebijakan pendidikan di era pandemi ini. Di Kabupaten Sumenep, salah seorang guru terpaksa harus mendatangi rumah siswanya satu persatu dikarenakan kebanyakan muridnya tidak mempunyai *smartphone* sementara itu sebagian siswa yang memiliki *smartphone* tetapi tidak memiliki kuota untuk mengakses internet sehingga mengalami kendala untuk melaksanakan pembelajaran secara online (Azanella, 2020)

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan peserta didik dari bahaya virus tetapi justru pula akan menimbulkan beberapa dampak pada peserta didik, guru dan orang tua. Peserta didik sendiri akan merasa terpaksa belajar dari rumah yang sebenarnya tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk hal tersebut, dengan begitu maka proses pembelajaran akan terhambat yang seharusnya sebelum dimulainya pembelajaran tersebut fasilitas pendukung sudah harus tersedia terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya terletak pada proses adaptasi pembelajaran, peserta didik yang tadinya cenderung berinteraksi langsung dalam pembelajaran di sekolah akan memerlukan berbagai macam adaptasi belajar serta memahami pembelajaran yang dimodelkan dalam jaringan ini, sehingga kebijakan yang diberikan bisa saja menimbulkan mandeknya pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Mengingat bahwa perubahan pendidikan ke pembelajaran online secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya tanggap siswa (Dewi, 2020).

Pembelajaran *daring* nyatanya memunculkan banyak masalah dalam implementasinya salah satunya menunjukkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang luas di masyarakat. Kesenjangan tersebut akhirnya menghasilkan ketimpangan pendidikan yang diterima peserta didik. Peserta didik miskin akan sulit mengakses pembelajaran *daring* karena ketiadaan sarana TIK (Muhajir, 2020). Terkait dengan biaya internet untuk belajar secara *daring*, bagi kalangan miskin atau kelas ke bawah mengalami keberatan untuk memenuhi itu semua. Yang dimana untuk makan saja mereka sangat pusing dan kesulitan untuk mencarinya atau memenuhinya apalagi untuk memenuhi biaya internet yang ±Rp100.000/bulan agar dapat melaksanakan belajar *daring* (Anggrayeni, 2020).

Bank Dunia memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan meningkat menjadi 30 juta jiwa pada tahun ini. Peningkatan jumlah penduduk miskin semakin tinggi karena tekanan ekonomi yang krisis akibat pandemi virus corona atau covid-19 (Wicaksono, 2020). Kemiskinan memang bukan hal baru di Indonesia. Bahkan selalu saja meningkat. Data BPS terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta jiwa, meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan September 2019 (Statistik, 2020). Kini, Covid-19 menjadi masalah baru bagi Indonesia, yang menciptakan krisis ekonomi yang cukup serius. Ekonomi rumah tangga masyarakat pastinya ikut terkena dampak covid-19 dan hal tersebut sudah mulai nampak berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 71 persen masyarakat menilai ekonomi rumah tangga mereka memburuk saat pandemic covid-19 (Katadata.co.id, 2020). Masyarakat miskin sangat merasakan dampak tersebut karena mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk bertahan di tengah pandemi.

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat menjadi wilayah yang cukup rentan dengan penyebaran wabah covid-19 mengingat tingginya tingkat mobiltas masyarakat. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi persebaran wabah virus ini. Kebijakan yang diterapkan ini pun ternyata memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial yang mengalami krisis ditengah pandemi ini. Berikut Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Padang



Tabel 1.1
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Bungus Teluk Kabung	3.665
2	Koto Tengah	11.287
3	Kuranji	9.084
4	Lubuk Begalung	7.322
5	Lubuk Kilangan	2.378
6	Nanggalo	3.542
7	Padang Barat	4.042
8	Padang Selatan	6.318
9	Padang Timur	5.376
10	Padang Utara	3.457
11	Pauh	3.888

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang, 2020

Berdasarkan data di atas, kecamatan Koto Tengah menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dengan tingkat kesejahteraan rendah sebanyak 11.287 orang kemudian disusul dengan kecamatan Kuranji dengan jumlah penduduk 9.087 orang. Sementara itu kecamatan Lubuk Kilangan memiliki tingkat kesejahteraan sosial paling sedikit dengan jumlah penduduk 2.378 orang sedangkan kecamatan Padang Utara menjadi kecamatan dengan posisi kedua terendah tingkat kesejahteraan dengan jumlah penduduk 3.457 orang.

Kesulitan ekonomi dan menurunnya tingkat kesejahteraan sosial sangat dirasakan bagi masyarakat dengan ekonomi ke bawah paling riskan terdampak wabah covid-19 di Kota Padang terutama bagi mereka yang tinggal di pusat kota yang bekerja pada sektor informal seperti pedagang kaki lima, karyawan toko, supir angkutan umum, petani, nelayan, buruh pabrik, buruh harian dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka hidup tanpa pekerjaan dan pemasukan, Sebagian lain terseok-seok dalam mempertahankan usahanya karena omzet penjualan yang minim. Dari sekian banyak para pekerja sektor informal yang terdampak akibat pandemi ini, peneliti tertarik untuk mengkaji kehidupan masyarakat di sektor perikanan yang bekerja sebagai nelayan.

Penelitian ini memfokuskan unit analisis terhadap pekerja sektor informal sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan nelayan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang sangat riskan dengan permasalahan sosial dan kehidupan yang statis yang pada umumnya para nelayan ini menjadikan melaut sebagai pekerjaan

utama dikarenakan tidak adanya skill dan kemampuan untuk bekerja di sektor lain. Sementara pekerjaan melaut memiliki pendapatan yang tidak menentu dan juga harus ditentukan kondisi alam. Bisa saja para nelayan ini mendapatkan upah yang lebih dan bisa juga mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hari esok dan bahkan bisa tidak mendapatkan apa-apa setelah melaut seharian. Hal ini tentu sangat berdampak kepada kesejahteraan kehidupan para nelayan. Di sisi lain, kehidupan nelayan yang pada umumnya sangat jauh dari perkembangan teknologi membuat masyarakat wilayah pesisir ini sulit untuk maju.

Para nelayan yang memiliki upah perhari ini sangat kesulitan ekonomi jika tidak melaut dalam beberapa hari. Dalam keadaan normal saja para nelayan ini rentan dengan permasalahan ekonomi dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi saat ini dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berada dalam krisis ekonomi yang meningkat akibat pandemi ini. Keadaan ekonomi nelayan yang pekerjaannya semata-mata tergantung pada usaha menangkap ikan memperoleh pendapatan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan jika ada uang yang tersisa, itu biasanya digunakan bagi mereka untuk biaya sekolah anak, membeli pakaian, dan memperbaiki tempat tinggalnya (Wasak, 2012).

Berdasarkan fakta di lapangan kehidupan para nelayan khususnya yang tinggal di sepanjang wilayah pesisir pantai Kota Padang senantiasa dilanda masalah-masalah sosial dan memang identik dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Kompasiana.com, 2018). Pekerjaan sebagai nelayan yang turun temurun membuat kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang terjadi pada kelompok nelayan menjadi struktural. Rendahnya sumber daya manusia serta tidak memiliki keahlian di bidang lain sehingga tidak ada dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat wilayah pesisir.

Pada umumnya nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Kota Padang khususnya nelayan yang tinggal di Kelurahan Air Tawar Barat dan Kelurahan Bungus Selatan ini adalah nelayan yang bekerja sebagai buruh nelayan yang mana merupakan nelayan dengan kelas sosial paling bawah. Nelayan buruh ini tidak memiliki alat tangkap dan memilih untuk bergabung dan bekerja dengan nelayan yang memiliki alat tangkap dengan sistem bagi hasil sehingga upah yang diterima pun kecil. Hal ini dibuktikan dengan upah yang diperoleh per harinya dengan kisaran Rp 15.000 - Rp 20.000. Ketika hasil tangkapan banyak bisa mencapai Rp 50.000 – Rp 100.000 bahkan juga pernah seharian melaut tetapi tidak mendapatkan upah karena tidak adanya hasil tangkapan. Belum lagi ketika kondisi alam seperti hujan disertai badai kencang sehingga tidak memungkinkan untuk melaut dalam waktu beberapa hari dan kondisi ini membuat para nelayan relatif menggagur tanpa adanya penghasilan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kerasnya hidup para masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini dengan mengharapkan kondisi alam.

Kompleksitas permasalahan sosial yang dialami para nelayan terlebih kondisi pandemi saat ini berimplikasi pada pendidikan yang ditempuh bagi anak-anak nelayan. Ruang belajar yang kini beralih dengan sistem online memaksa mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar anak yang cukup besar dari segi biaya yang mana harus menyediakan *smartphone* dan kuota internet agar tetap dapat belajar. Ada keluarga-keluarga yang tak punya ponsel sama sekali; ada juga yang bergantian memakai satu ponsel milik orangtuanya. Dan, sekalipun mudah mendapatkan akses internet dan punya ponsel, banyak keluarga yang kerepotan membeli kuota, di saat ekonomi keluarga luntang-lantung. Belum lagi ketidakmampuan orang tua dalam mendampingi anak belajar karna keterbatasan pengetahuan dan tidak paham dengan materi belajar anak.

Menurut Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, peserta didik dapat belajar jarak jauh harus memiliki fasilitas dan menguasai penggunaan produk teknologi yang digunakan dalam belajar. Produk teknologi yang dapat digunakan oleh peserta didik di antaranya komputer, laptop, notebook, dan *handphone*. Ada juga kondisi guru sudah ada komputer terbaru tetapi tidak bisa menjalankan, jadi

persoalan teknis yang nyata. Di sisi orangtua, yang terbiasa mengandalkan pihak eksternal, mulai dari sekolah hingga bimbingan belajar dalam mendidik anak, akhirnya kebingungan ketika proses belajar dilakukan di rumah. Dari sisi ekonomi, disebutkan, pembelajaran *daring* tidak bisa dilakukan merata, karena masih banyak siswa yang tak memiliki akses terhadap teknologi, atau tak mampu membayar biaya belajar *daring*. Sedangkan dari sisi budaya, Kemendikbud mesti memperhatikan budaya siswa yang belum mampu belajar mandiri (SumbarFokus, 2020).

Pandemi Covid -19 ternyata memberikan dampak yang cukup berat bagi pendidikan di Sumatera Barat (Sumbar). Seperti diakui Gubernur Sumbar penghantaran pembelajaran kepada anak didik menjadi sangat terkendala, terlebih lagi karena adanya keterbatasan fasilitas dan keterbatasan kemampuan tenaga pendidik. Menurut pengamatannya, masih adanya guru yang belum menguasai Ilmu Teknologi (IT), seperti menggunakan komputer atau mengajar melalui *daring* (internet). Ini tentu perlu disikapi dengan memberikan pembekalan terhadap SDM dalam penggunaan IT, agar lebih siap untuk bekal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) (SumbarFokus, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kajian penelitian pada ketertinggalan budaya pembelajaran *daring* di era pandemi pada kelompok nelayan miskin di Kota Padang. Mengingat kehidupan ekonomi masyarakat nelayan yang rentan dengan masalah sosial. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Kota Padang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini tergambar dari kondisi kehidupan kesejahteraan keluarga melalui tingkat pendapatan mereka, pemukiman nelayan yang terkesan kumuh, kondisi kalayakan rumah, kurangnya potensi yang dimiliki oleh nelayan, keterampilan yang sulit untuk dijual, dan tingkat pendidikan masih rendah yang mengantarkan kepada kesulitan orang tua dalam mendampingi anak belajar selama tidak ada proses pembelajaran di sekolah.

Penjelasan mengenai pendidikan pada anak di kalangan keluarga miskin pada kelompok nelayan mendorong munculnya kajian-kajian sosiologis lebih khususnya sosiologi pendidikan. Menurut Damsar, sosiologi pendidikan dapat

didefenisikan dengan dua cara. *Pertama*, Sosiologi pendidikan dapat didefenisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial, dengan pendidikan. Dalam hubungan ini, dapat dilihat bagaimana masyarakat memengaruhi pendidikan. Juga sebaliknya, bagaimana pendidikan memengaruhi masyarakat. Sosiologi pendidikan mengkaji bagaimana masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan pendidikan. Hubungan dilihat dalam sisi saling mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-obyektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan pendidikan seperti apa saja isi dari pendidikan, bagaimana mendidiknya, siapa mendidik dan dididik dan dimana pendidikan dilakukan. Tuntunan ini biasanya berasal dari budaya termasuk di dalamnya hukum, ideologi serta agama. *Kedua*, sosiologi pendidikan didefenisikan sebagai pendekatan sosiologi yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan (Damsar, 2011 : 9-11).

Pendidikan merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu proses dalam pendidikan (Damsar, 2011 : 10). Pendidikan menjadi sebuah alat sosialisasi kepada anak-anak dan generasi muda untuk menjadikan mereka sebagai bagian dari kehidupan sosial (Hidayat, Rakhmat, 2014 : 89). Sejalan dengan itu, Freire mengatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah *pilot preject* dan agen untuk melakukan perubahan sosial guna membentuk masyarakat baru (Freire,1999 : 5). Sepanjang hidup, kita belajar banyak hal dari keluarga, kelompok-kelompok bermain, pemimpin agama dan media masa. Tetapi sebagian besar proses belajar di dalam masyarakat diperoleh melalui sistem pendidikan formal. Pendidikan diartikan sebagai berbagai macam cara di dalamnya pengetahuan khusus, baik informasi faktual dan keterampilan maupun nilai-nilai dan norma budaya kepada anggota masyarakat. Sebagian dari proses transfer nilai, norma, informasi faktual dan keterampilan ini dilakukan di sekolah. Karena itu, sekolah berarti ada tempat di mana anak-anak

diajarkan tentang berbagai hal oleh guru-guru yang terlatih mengikuti peraturan yang sudah mapan (Raho, Bernand. 2016 : 280).

Senada dengan itu, menurut Durkheim, pendidikan adalah suatu sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial yang mana suatu masyarakat dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Guru adalah agen masyarakat yang sangat penting dalam pengalihan budaya. Tugas guru adalah menciptakan suatu makhluk sosial, suatu makhluk yang bermoral. Pendidikan bukan hanya masalah memungkinkan seseorang individu berkembang sesuai dengan kodratnya, atau hanya menyingkapkan segala kemampuan tersembunyi pada si individu yang menunggu penampakannya. Pendidikan menciptakan makhluk baru (Durkheim, 1990).

Terbentuknya lembaga pendidikan merupakan konsekuensi logis dari taraf perkembangan masyarakat yang sudah kompleks (Hidayat, Rakhmat. 2014 : 33). Sekolah merupakan sebuah institusi pendidikan yang menjadi wadah dalam keberlangsungan proses pendidikan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektifitas dalam pemberian pendidikan kepada warga masyarakat (Gunawan, 2010 : 113). Sekolah sebagai wujud nyata agen sosialisasi sebagai pengganti apa yang dilakukan dalam keluarga. Dalam masyarakat industri, hal itu menjadi terasa karena keluarga sudah tidak sanggup menyediakan model pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. (Raho, Bernard. 2016 : 282). Ruang kelas dipandang sebagai sebuah masyarakat sebab hubungan guru-murid merupakan suatu interaksi sosial, hubungan guru-murid mengandung suatu tindakan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Oleh karena itu, hubungan guru-murid dapat dilihat sebagai sistem interaksi sosial (Damsar, 2011 : 98).

Dalam mengajar di kelas, dapat dijabarkan delapan prinsip pendidikan dari pespektif Habermasian terkait dengan pandangannya tentang kepentingan pembentukan pengetahuan. (1) Perlunya kegiatan yang bersifat kooperatif dan kolaboratif, (2) Kebutuhan akan kegiatan berdasarkan diskusi (*discussion based work*), (3) Perlunya belajar mandiri, melalui pengalaman, dan fleksibel (4)

Perlunya belajar melalui diskusi (*negotiated learning*), (5) Perlunya proses belajar yang terkait dengan komunitas agar anak didik dapat memahami dan menyelidiki pelbagai lingkungan, (6) Perlunya aktifitas pemecahan masalah, (7) Perlunya memperbesar hak anak didik untuk berbicara, (8) Perlunya guru untuk bertindak sebagai “intelektual transformatif” dengan mendorong kritik ideologis (Arif Mukhrizal, 2014 : 38).

Dewasa ini pendidikan di Indonesia yang ikut terimbas akibat situasi dan kondisi yang berubah terkait wabah virus covid-19 merubah sistem dan pola pembelajaran yang tentunya sangat jauh dari apa yang sudah menjadi landasan fundamental dalam sistem pembelajaran. Sekolah yang hakikatnya melaksanakan proses pembelajaran melalui tatap muka dan interaksi antara guru dan siswa di lingkungan sekolah kini bergeser menjadi sekolah berbasis online (*daring*). Sistem pembelajaran online ini membuat siswa dan guru kesulitan dalam berinteraksi. Kendati demikian berbagai aturan dan panduan pembelajaran online telah diterbitkan dan diatur secara apik agar pelaksanaan pembelajaran tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan hakekat dari pembelajaran. Realitanya, apa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam proses pembelajaran tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam model pembelajaran saat ini baik dari sisi guru, siswa dan orang tua. Kegagalan sistem pembelajaran saat ini tentu berdampak terhadap kualitas pendidikan walaupun pemerintah telah mendesain model pendidikan di era pandemi ini.

Pada dasarnya, sebagian besar kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu sangat bagus, hanya saja kelemahannya pada aplikasinya (Arif Mukhrizal, 2014 : 60). Hal ini dapat dilihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran online yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan terkendala pada infrastuktur yang digunakan. Tidak semua siswa memiliki infrastruktur teknologi dewasa ini terutama bagi kalangan masyarakat miskin. Mereka yang hidup dengan serba keterbatasan tentu tidak memungkinkan dapat memenuhi perangkat belajar seperti *smarthphone* yang digunakan sehingga membuat siswa kesulitan dalam mengakses pembelajaran secara online. Masyarakat miskin termaginalkan dari pendidikan saat ini dan kesulitan untuk dapat tetap mengakses pembelajaran.

Sementara di lain sisi, masyarakat yang hidup dengan berkecukupan dapat menyediakan fasilitas pembelajaran saat di rumah.

Akses pendidikan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya patut menjadi perhatian bagi semua kalangan di masyarakat mengingat pendidikan merupakan proses humanisasi yaitu memanusiakan manusia dan membebaskan masyarakat dari belenggu ketertindasan. Humanisasi merupakan masalah sentral bagi manusia dan oleh sebab itu humanisasi merupakan sesuatu yang musti diperjuangkan (Freire, 2008 : 11). Melihat kondisi pendidikan saat ini, masyarakat miskin harus memperjuangkan hak nya agar tetap dapat memperoleh pendidikan saat pandemi sekarang ini. Mengingat keterbatasan ekonomi dan ketidaktiadaan infrastruktur pembelajaran seperti *smartphone* mengantarkan mereka pada sulitnya terhadap akses belajar. Hal ini dapat dilihat bagaimana terseok-seoknya para orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Oleh karena itu pendidikan saat ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek intelektual saja melalui *transfer of knowledge* dan *transfer of value* tetapi juga kebutuhan praktisnya yaitu ketersediaan infrastruktur pembelajaran online.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwasannya pembelajaran *daring* yang dilaksanakan pada kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan mengalami banyak kendala dalam proses pembelajarannya tidak hanya dikarenakan ketidaksiapan guru, siswa, dan orang tua dengan sistem dan metode pembelajaran yang berubah tetapi juga keterbatasan infrastruktur pembelajaran seperti ketersediaan *smartphone*, kuota internet, serta minimya penguasaan teknologi pada kelompok nelayan. Ruang belajar yang bergeser menjadi sistem online mengantarkan guru dan siswa pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang yang mana pembelajaran online saat ini dilaksanakan dengan *platform* melalui *zoom*, *google classroom*, *whatsapp* dan lain sebagainya. Suasana belajar yang biasanya terjadi dalam kelas kini sudah tidak ditemui lagi pada saat belajar online.

Kemampuan dan Ketidaksiapan tidak hanya dialami guru, siswa dan orang tua. Sistem pembelajaran dan pola pembelajaran pun juga kesulitan

beradaptasi dengan pembelajaran *daring* saat ini. Perkembangan budaya pembelajaran *daring* mulai dari infrastruktur yang digunakan, media pembelajaran melalui *platform* terus mengalami perkembangan sementara aturan, nilai dan tata cara dalam implementasinya tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketertinggalan kebudayaan (*cultural lag*) yang mana kebudayaan materiil yang terdiri dari infrastruktur dan sistem pembelajaran yang terus berubah tidak diikuti dengan kebudayaan non-materiil berupa aturan yang telah ditetapkan dalam mengakses media pembelajaran sehingga aturan ini menjadi tertatih dan tertinggal di belakang (*lag behind*). Hal ini dapat dilihat bagaimana *cultural lag* terjadi ketika media pembelajaran melalui *platform* yang sudah disediakan seperti *zoom* dan *google classroom* sudah maju sementara aturan mengenai cara penggunaan *platform* pembelajaran tersebut belum diimplementasikan secara baik.

1.2 Rumusan Masalah

Tidak bisa dipungkiri sektor pendidikan di Indonesia kini tengah mengalami persoalan serius karena tidak semua para guru, siswa dan orang tua siswa benar-benar siap dalam menghadapi proses pembelajaran secara *daring* di tengah pandemi covid-19 ini terutama kesiapan bagi para orang tua. Bagi sebagian masyarakat dengan ekonomi rendah, pembelajaran *daring* ini membuat biaya menjadi bertambah ketimbang belajar secara konvensional. Dikutip dari Tribunews.com, salah satu orang tua mengutarakan bahwasannya pembelajaran *daring* harus mengeluarkan biaya ekstra, karena walaupun sudah tidak memberikan uang jajan selama belajar di rumah, namun biaya untuk online mengikuti pembelajaran tidak gratis. Kuota internet dan *gadget* jadi biaya tambahan yang lebih mahal dari hanya sekedar uang jajan (Tribunmanado.co.id, 2020)

Pembelajaran di rumah dinilai menimbulkan dampak pengeluaran yang cukup besar, yaitu untuk pulsa untuk koneksi internet, serta menuntut orang tua untuk melek akan teknologi demi mendukung proses pembelajaran di rumah (Cahyati & Kusumah, 2020) Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto et al (2020) bahwa kendala yang dihadapi para orang tua adalah adanya penambahan biaya

pembelian kuota internet, teknologi online memerlukan koneksi jaringan internet dan kuota oleh karena itu tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan tentunya akan menambah beban pengeluaran orang tua untuk melakukan pembelajaran online dan hal ini sangat terasa sulit bagi masyarakat yang tergolong miskin.

Kesenjangan digital menjadi hambatan utama dalam proses pembelajaran *daring*. Dalam hal ini, masyarakat miskin khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir menjadi kelompok yang paling rentan akan kewalahan ketika harus memenuhi kebutuhan belajar anak. Ketidaktiadaan *smartphone*, laptop, biaya kuota internet menjadi bukti nyata bahwasannya pembelajaran *daring* ini membuat masyarakat miskin temaginalkan dari dunia pendidikan karena mereka tidak bisa mengakses pembelajaran online tanpa adanya teknologi sebagai pendukung proses pembelajaran.

Permasalahan pembelajaran *daring* tidak hanya pada teknologi yang digunakan saja, peran orang tua juga menjadi sorotan dalam pembelajaran saat ini dimana peran orang tua menjadi kunci keberhasilan anak dalam proses pembelajaran secara online. Kemampuan orang tua dalam mendampingi serta menjadi guru yang baru bagi anak sangat penting terutama bagi anak yang masih berada pada tingkatan sekolah dasar (SD) yang masih butuh bimbingan dan arahan dari orang tuanya. Faktanya tidak semua materi pembelajaran dapat dipahami oleh orang tua terlebih orang tua yang mempunyai pendidikan rendah terutama masyarakat pesisir khususnya kelompok nelayan yang terkebelakang dalam hal pendidikan.

Proses pembelajaran yang seyogyanya terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Namun pada kondisi pandemi saat ini, metode pembelajaran *daring* membuat guru dan siswa dipertemukan dengan ruang belajar online melalui *platform* pembelajaran yang telah disediakan seperti *zoom*, *google classroom*, *whatsapp* dan lain sebagainya. Dengan *platform* pembelajaran ini guru dan siswa dapat terkoneksi di waktu yang sama namun dengan tempat yang berbeda. Saat ini sekolah tidak lagi menyediakan sarana dan

prasarana pembelajaran seperti ruangan kelas, meja, kursi, papan tulis dan lain sebagainya. Infrastruktur pembelajaran diganti dengan ketersediaan *platform* atau aplikasi digital seperti *zoom*, *google classroom*, *whatsapp group* dan lain sebagainya untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang dilakukan. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online melalui berbagai aplikasi digital tersebut. Melalui media pembelajaran online ini, diharapkan para peserta didik tetap bisa berinteraksi dengan guru dalam satu waktu yang sama walaupun dari jarak kejauhan. Namun nyatanya tidak semua *platform* media pembelajaran dapat digunakan oleh siswa, guru dan orang tua memiliki keterbatasan dalam mengakses bagaimana penggunaan *platform* pembelajaran

Infrastruktur media pembelajaran di era pandemi ini sudah semakin maju dengan adanya *platform* pembelajaran seperti *zoom*, *google classroom*, dan lain sebagainya yang dirancang kemendibud sudah mengalami kemajuan sementara aturan dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini belum diterapkan sepenuhnya. Belum adanya aturan yang mengatur bagaimana pembelajaran yang dilakukan melalui *platform* yang tersedia misalnya dalam hal proses pembelajaran, belum diterapkan sepenuhnya indikator – indikator yang menjelaskan siswa benar-benar hadir dan mengikuti kelas virtual melalui media pembelajaran, aturan dalam memberi penilaian baik itu tugas harian maupun ujian kepada siswa, capaian pembelajaran dengan kurikulum yang belum disesuaikan, serta proses adaptasi yang membuat siswa SD kesulitan dalam memahami pelajaran dengan menggunakan media suara ataupun melalui video secara virtual. Kondisi ini memperlihatkan bahwasannya budaya pembelajaran *daring* tertinggal dengan media pembelajaran yang sudah mengalami kemajuan.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka masalah penelitian yang menarik untuk dikaji oleh peneliti adalah

“Bagaimana Ketertinggalan Budaya Pembelajaran *Daring* Pada era Pandemi Covid-19 Pada Kelompok Nelayan Miskin di Kota Padang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana ketertinggalan budaya pembelajaran *daring* pada era pandemi covid-19 pada kelompok Nelayan miskin di Kota Padang.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mendeskripsikan proses dan masalah pembelajaran *daring* pada kelompok nelayan miskindi Kota Padang
2. Untuk mendeskripsikan ketertinggalan budaya pembelajaran *daring* pada era pandemi covid-19 pada kelompok nelayan miskin di Kota Padang.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

Aspek akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan sosiologi terutama sosiologi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang bagi para *stakeholder* bidang pendidikan untuk dapat meneliti lebih lanjut atau mengembangkan penelitian ini. Selain itu para *stakeholder* dari bidang kajian ilmu lain juga dapat meneliti kajian ini tanpa menghilangkan unsur pendidikan di dalamnya. Penelitian ini juga menjadi bahan pembandingan bagi penelitian-penelitian lain yang sejenis untuk menginspirasi munculnya penelitian-penelitian lanjutan dari isu dan perspektif yang beragam dari khasanah ilmu yang berbeda pula. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan gambaran kondisi obyektif kehidupan masyarakat nelayan kepada pihak-pihak pemangku kebijakan yang berkepentingan dengan hal tersebut serta dapat mengumpulkan data terkait yang tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Bagi peneliti yang ingin lebih lanjut melakukan penelitian ini dapat mengkaji dari apa yang belum ditemukan atau diungkapkan oleh peneliti. Misalnya permasalahan yang belum terungkap oleh peneliti dalam ketertinggalan pembelajaran *daring* pada kelompok nelayan miskin di kota Padang adalah dari segi siswa yakni perubahan pembelajaran *daring* yang memiliki dampak intelektual, kreatifitas, dan inovasi bagi peserta didik selama pembelajaran online mengingat revolusi industri 4.0 yang juga mengikutsertakan sistem pendidikan sebelum pandemi ini. Pembelajaran secara online tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja yang cenderung lebih mengarah kepada problematis pembelajaran *daring* tetapi bisa dikaji bagaimana siswa dapat berinovasi dan berkreatifitas serta beradaptasi dengan sistem pembelajaran online ini.

1.4.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap perbaikan kebijakan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai aturan dan tata cara dalam proses pembelajaran *daring* sehingga penggunaan media pembelajaran sebagai infrastruktur pendidikan saat ini dapat digunakan secara efektif sehingga tidak ada lagi alasan pembelajaran online terkendala baik dari guru, siswa dan orang tua sehingga sistem pembelajaran secara *daring* ini tidak lagi menjadi problematis dalam metode dan pola pembelajarannya karena sudah ada aturan yang jelas secara formalitas. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah melalui *stakeholder* untuk dapat mensosialisasikan kepada siswa, guru serta orang tua mengenai sistem pembelajaran *daring* melalui kelas virtual.

Penelitian ini juga memberikan acuan kepada pemerintah khususnya Dinas Sosial mengenai pendistribusian bantuan kepada masyarakat miskin khususnya para nelayan yang hidup dalam kondisi yang tidak sejahtera sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana sistem pendidikan *daring* saat ini yang masih menjadi problematis dari berbagai pihak seperti guru, siswa dan orang tua serta perlunya evaluasi sistem pembelajaran *daring* setelah satu semester. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat mensosialisasikan para nelayan ini mengenai alat penangkapan ikan yang modern dan tidak hanya terpaku dalam penggunaan alat tradisional ketika menangkap ikan selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga dapat berupaya untuk dapat mengeksport hasil tangkapan ke luar daerah sehingga dengan demikian penghasilan para nelayan bisa lebih meningkat serta kehidupan nelayan bisa dapat menjadi lebih baik. Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memberikan pelatihan UMKM kepada para nelayan ini sehingga para nelayan dapat membuka usaha dan lebih kreatif dan tidak hanya berfokus kepada pekerjaan menangkap ikan dengan ketidakpastian penghasilan yang dihasilkan.